



RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Militer II – 11
Yogyakarta

Jl. Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta

Yogyakarta, Januari 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 ini kita dapat menyusun Penetapan Kinerja.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini masih banyak kekerungan, oleh karena itu kami mengharapakan masukan, sumbangan pikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih sempurna.

Kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, khususnya yang secara langsung membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, dan kami berharap semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Yogyakarta, Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer II-11,

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Kolonel Chk NRP 11000045041178

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
BAB II	
RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	2
BAB IV	
PENUTUP	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Yang menjadi latar belakang adalah adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah yang ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan tahunan tersebut, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi Jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (*blue print*)

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini sebagai tonggak Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapan Standart Operasional Prosedur (SOP) serta alur kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
NOMOR : W2.MIL.04 /02/RKT.OT.01.1/I/2024
Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%
		Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%



Yogyakarta,

Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer II-11,

Rony Suryandoko

Kolonel Cnk

BAB III

PENUTUP

Belum optimalnya beberapa standart pelayanan, sumber daya Manusia yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menyusun Rencana kinerja Tahunan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja dimasa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.